

# **PARTISIPASI POLITIK REMAJA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 (Studi Kasus: di Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota)**

**Bintang Ridlotul Abidah Al Islami<sup>1</sup>, Lutfi Wahyudi<sup>2</sup>, Melati Dama<sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar partisipasi politik remaja dalam pemilihan kepala daerah Kota Balikpapan pada tahun 2015 di Kelurahan Telaga Sari terutama dalam hal keikutsertaan dalam keanggotaan partai politik, diskusi politik, kampanye, serta pemberian suara. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik remaja dalam hal kepengurusan partai politik dikarenakan kesibukan remaja, pada diskusi politik remaja lebih bersifat informal membicarakan masalah politik bersama keluarga, teman sebaya atau teman sekantornya. Pada kampanye remaja lebih menyukai hal yang bersifat massa atau hiburan. Namun dalam hal pemberian suara, remaja di Kelurahan Telaga Sari cukup tinggi yakni sebanyak 786 jiwa.*

**Kata Kunci:** *Partisipasi, politik, remaja, pemilihan, umum, kepala, daerah.*

## **Pendahuluan**

Negara demokrasi memiliki suatu gagasan yakni, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum secara langsung merupakan salah satu wujud dari demokrasi dengan melibatkan warga negara untuk berpartisipasi. Pemilihan Presiden, pemilihan anggota DPR dan DPRD, pemilihan Kepala Daerah juga dilaksanakan secara demokratis. Di Indonesia untuk pertama kalinya diadakannya pemilihan umum Presiden secara langsung pada tahun 2004. Pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia dilakukan dengan kurun waktu 5 tahun sekali dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana tercantum dalam pasal 1 (ayat 6) Undang Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang menjelaskan bahwa “Pemilu

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [bintang.alislami@gmail.com](mailto:bintang.alislami@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa kegiatan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditegaskan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sama halnya dengan Pemilu Presiden, Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum. Lebih lanjut diatur dalam pasal 4 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 bahwa kegiatan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi persiapan, tahap pelaksanaan dan penyelesaian.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilihan inilah rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dalam hal ini setiap sikap dan perilaku politik individu mendasari pada kehendak hati nurani secara sukarela dalam kehidupan politik.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan serta kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi kadar ukur seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik akan menjadi pasif bahkan bisa sampai ke arah apatis. Hal yang paling kecil dalam kesadaran akan partisipasi politik yaitu terlibatnya masyarakat sebagai pemilih dalam menyeleksi atau memilih Kepala Daerah.

Dalam pasal 1 ayat (9) UU No 12 tahun 2010 tentang pedoman tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Pemilih, yang dimaksud pemilih adalah warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu

Walikota dan Wakil Walikota telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin, kemudian pada pasal 3 warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/ atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih, untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Monks (2000) dkk, menggolongkan masa remaja secara global berlangsung antara usia 12 tahun samapai 21 tahun, dengan pembagian 12 sampai 15 tahun untuk masa remaja awal, 15 tahun sampai 18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18 tahun ampai 21 tahun untuk remaja akhir.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa remaja yang termasuk juga dalam pemilih pemula adalah warga yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih tetap dan baru mengikuti pemilu, yang termasuk dalam golongan usia remaja peneliti mengambil rentang usia 17-21 tahun karena pada usia 17 tahun seseorang baru bisa terdaftar sebagai pemilih. Layaknya sebagai pemilih pemula, pemilih remaja ini tidak memiliki pengalaman voting pada pemilu sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik karena pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan yang lalu telah disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat termasuk kepada remaja sebagai pemilih pemula di Kota Balikpapan. Adanya sosialisasi kepada remaja dikarenakan mereka masih memerlukan pembinaan serta tuntunan dalam pemilihan.

Pengetahuan politik remaja sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok pemilih lain. Perilaku pemilih masih erat dengan faktor sosiologis dan psikologis dalam menjatuhkan pilihannya. Namun yang membedakan pemilih remaja dengan pemilih yang lainnya adalah soal pengalaman politik dalam menghadapi pemilihan umum. Pemilih remaja masih cenderung tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau pengaruh dari sekitarnya seperti, pemilih remaja yang memberikan suaranya karena pengaruh dari orang tua atau mengikuti apa yang orang tua mereka pilih, ada yang karena diberi uang oleh para partai pengusung calon, memilih karena pengaruh dengan teman sebayanya, ada juga yang memilih karena keinginan sendiri tanpa ada pengaruh dari orang tua ataupun uang dan ada yang memilih untuk tidak datang ke TPS atau golput.

Perlu diketahui Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya

lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kelurahan Telaga Sari yang merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Balikpapan Kota. Keterlibatan pemilih remaja dalam pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2015 yang lalu merupakan salah satu bentuk dari partisipasi pemilih remaja untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota. Di Kelurahan Telaga Sari terdapat 44 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap pada tahun 2015 sebanyak 12.443 jiwa, untuk remaja sendiri yang terdaftar sebagai pemilih tetap sebanyak 1.410 jiwa. Penulis tertarik mengadakan penelitian di daerah ini karena pemilih remaja cenderung aktif di dalam partisipasi politik itu sendiri, seperti mengikuti kampanye terbuka, diskusi politik, serta pemberian suara (wawancara Lurah Telaga Sari). Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana partisipasi politik pemilih remaja dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 maka perlu diadakan penelitian terhadap hal tersebut. Dari latar belakang yang telah dipaparkan penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Partisipasi Politik Remaja Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Di Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota"

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Partisipasi Politik***

McClosky (dalam Suryadi 2007:129), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.

Budiarjdo (2008:367) mengungkapkan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli maka yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah turut andilnya Warga Negara dalam proses politik yang berupa kegiatan positif maupun yang bersifat negatif untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka memengaruhi pemerintah.

### ***Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik***

Pada hierarki dan bentuk partisipasi politik Rush dan Althoff, Rafael Raga Maran juga berpendapat sama dapat dilihat dalam bukunya Pengantar Sosiologi Politik (2007:148) bentuk partisipasi berupa: 1) Partisipasi politik dalam partai politik, yang terdiri dari partisipasi aktif dimana orang-orang yang bersangkutan menduduki jabatan termasuk suatu organisasi politik. Memberikan dukungan keuangan atau membayar iuran keanggotaan dan partisipasi pasif sebaliknya, 2) Partisipasi berupa mengikuti suatu rapat umum atau kampanye yang

diselenggarakan oleh suatu organisasi politik, dan atau kelompok kepentingan tertentu, 3) Partisipasi yang bersifat sebentar atau singkat adalah diskusi politik informal, yang dilakukan baik di dalam keluarga, tempat kerja atau yang lainnya, 4) Partisipasi yang tidak banyak menuntut upaya ialah ikut memberikan suara dalam suatu kegiatan pemungutan suara.

### ***Tipologi dan Model Partisipasi Politik***

Dari sisi tipologi, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif : mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori pasif berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah (Ramlan Surbakti, 2007 : 98).

Adapun hubungan faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi dikategorikan sebagai variable pengaruh atau variable independen. Kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah dikategorikan sebagai variabel antara. Kemudian partisipasi politik dikategorikan sebagai variabel terpengaruh atau variable dependen (Surbakti dalam Gatara 2007 : 100). Dengan kata lain partisipasi politik itu sendiri dipengaruhi oleh faktor kesadaran politik, kepercayaan kepada pemerintah, status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua, serta pengalaman dalam berorganisasi.

### ***Remaja***

Monk (Monks & Knoers, 2002, pp.258-259) menerangkan bahwa dalam perkembangan keperibadian seseorang maka remaja mempunyai arti yang khusus, namun begitu masa remaja mempunyai tempat yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan seseorang. Anak remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas.

Lebih lanjut, Sarlito (1994) mengatakan bahwa kategori remaja lebih mengacu pada landasan usia yang berkisar antara 11-21 tahun dan belum menikah karena bagi masyarakat kita, seseorang yang sudah menikah pada usia berapa pun diperlakukan sebagai orang dewasa.

Dari beberapa teori di atas dapat diketahui bahwa yang termasuk remaja adalah mereka yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju ke arah dewasa dengan usia 12 sampai dengan 21 tahun dan belum menikah.

### ***Pemilih Remaja***

Pemilih remaja yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadisegmen yang memang unik sering kali memunculkan kejutandan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik sebab

perilaku pemilih remaja dengan antusiasme tinggi, relative lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme.

Pemilih remaja memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pemilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih remaja sebagai *swing voters* yang sesungguhnya (Litbang Kompas). Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih remaja mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman. Selain itu media massa juga ikut berpengaruh terhadap pilihan pemilih remaja. Hal ini dapat berupa berita di televisi, spanduk, brosur, poster dan lain-lain.

Pemilih remaja yang khususnya berusia 17 tahun memiliki nilai-nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah yang paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan (Suhartono, 2009:6).

Indikator utama yang dimiliki oleh setiap pemilih remaja yang dianggap mendasari atau melatar belakangi tingkat partisipasi pemilih remaja adalah tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Setiap komunitas masyarakat memiliki latar belakang tertentu yang dapat diungkapkan beraneka ragam. (Mohtar Mas'ood, 2008:61).

Dari definisi diatas yang dimaksud dengan pemilih remaja adalah warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih tetap dan baru mengikuti pemilu dengan rentang usia 17-21 tahun.

### ***Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)***

Wahyu Ishardino (2011:72) Pilkada langsung adalah bentuk demokrasi dimana rakyat menentukan secara langsung siapa tokoh yang akan menjadi pemimpin di daerahnya. Dengan menentukan langsung Kepala Daerahnya, maka segala kemungkinan hambatan, penyelewengan, dan distorsi yang biasa terjadi dalam sistem perwakilan akan dapat dipersempit atau diperkecil.

Joko (2005:203) mengatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Dalam kehidupan politik di daerah pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu kegiatan, yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan sejajar antara Kepala Daerah dan DPRD. Hubungan kemitraan dijalankan dengan melaksanakan fungsi masing-masing sehingga terbentuk mekanisme *check and balance*.

Dari beberapa pendapat diatas yang dimaksud pemilihan kepala daerah adalah suatu sarana yang digunakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau

hak rakyat secara demokratis dengan cara menyeleksi atau memilih kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian tentang partisipasi politik remaja dalam pemilihan kepala daerah Kota Balikpapan tahun 2015 di Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.

Fokus penelitian dapat dirinci melalui bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi

- a. Keikutsertaan dalam Keanggotaan Partai Politik
- b. Diskusi Politik
- c. Kampanye
- d. Pemberian Suara

### **Hasil Penelitian**

#### ***Bentuk Partisipasi Politik Remaja dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 di Kelurahan Telaga Sari Keikutsertaan dalam Partai Politik***

Keikutsertaan remaja dalam partai politik sangat rendah dan jika mereka terlibat di dalamnya di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari ajakan orang tua sebanyak 4 orang dengan rincian laki-laki 1 orang (25%) dan perempuan 3 orang (75%) dan selisih antara laki laki dan perempuan adalah 3 orang (50%). Artinya keikutsertaan remaja perempuan berpolitik lebih mudah mengikuti ajakan orang tua dibanding remaja laki-laki. Meskipun keikutsertaan remaja dalam mengikuti partai politik di Kelurahan Telaga Sari sangat rendah ternyata ajakan orang tua agar remaja ikut berpolitik sangat dominan yang biasa di sebut dengan faktor eksternal dengan kata lain keikutsertaan remaja dalam partai politik di Kelurahan Telaga Sari belum memiliki Visi Misi yang jelas dari dalam dirinya yang biasa di sebut dengan faktor internal dengan kata lain faktor internal keinginan diri sendiri untuk berpolitik lebih rendah dibandingkan dengan faktor eksternalnya.

Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa tidak adanya ketertarikan remaja untuk ikut bergabung atau menjadi salah satu kepengurusan dalam partai politik, bila ada remaja yang ikut bergabung dalam partai politik itu karena adanya pengaruh dari orang-orang terdekat mereka.

Rafael Raga Maran dalam bukunya Pengantar Sosiologi Politik (2007:148) salah satu bentuk partisipasi politik yaitu berpartisipasi dalam partai politik, yang terdiri dari partisipasi aktif dimana orang-orang yang bersangkutan menduduki jabatan termasuk suatu organisasi politik, memberikan dukungan keuangan atau membayar iuran keanggotaan dan partisipasi pasif sebaliknya.

Rafael Raga Maran memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti bahwa remaja kelurahan Telaga Sari tidak memberikan partisipasi politik dalam

bentuk partisipasi aktif salah satu bentuk partisipasi politik yaitu berpartisipasi dalam partai politik, yang terdiri dari partisipasi aktif dimana orang-orang yang bersangkutan menduduki jabatan termasuk suatu organisasi politik, memberikan dukungan keuangan atau membayar iuran keanggotaan dan partisipasi cenderung sebaliknya dalam bentuk partisipasi politik pasif artinya remaja Kelurahan Telaga Sari dalam berpartisipasi politik tidak ikut terlibat dalam perebutan jabatan politik, tidak memberikan dukungan keuangan dalam partai politik .

Rush dan Althoff dalam Pengantar Sosiologi Politik (2011 : 122) mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik, mereka menjelaskan bahwa bentuk partisipasi berupa Keanggotaan aktif suatu organisasi politik, partisipasi yang dilakukan seseorang sebagai anggota dari partai politik yang aktif secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu, serta keanggotaan aktif tersusun mulai dari menduduki jabatan sampai pada memberikan dukungan keuangandengan membayar sumbangan atau uang iuran keanggotaan dalam organisasi politik tersebut. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik, partisipasi yang dilakukan seseorang sebagai anggota organisasi politik, biasa hanya kegiatan yang menaati, menerima dan melaksanakan peraturan atau arahan yang ada pada keanggotaan organisasi politik. Maka bentuk partisipasi politik remaja di Kelurahan Telaga Sari sesuai dengan posisi ke empat yaitu keanggotaan pasif suatu organisasi politik yaitu partisipasi tidak banyak menuntut suatu upaya melainkan hanya ikut memberikan suara pada saat pemungutan suara. Remaja di Kelurahan Telaga Sari sangat jarang yang menjadi pengurus anggota partai politik. Minimnya keterlibatan remaja di Kelurahan Telaga Sari belum begitu berpartisipasi dalam hal ini dikarenakan remaja di Kelurahan Telaga Sari belum begitu merespon ajakan dari kader partai untuk bergabung dalam struktur keanggotaan partai politik. Kurangnya minat remaja untuk bergabung struktur partai disebabkan oleh banyak faktor antara lain faktor kesibukan sehari-hari sehingga remaja sulit membagi waktu antara bekerja dengan mengurus partai. Selain faktor waktu, kurangnya masalah pendidikan politik dikalangan remaja, sehingga remaja enggan untuk bergabung dalam pengurusan partai politik.

Keikutsertaan remaja Kelurahan Telaga Sari dalam Partai Politik adalah menjadi keanggotaan pasif yaitu remaja tidak terlibat langsung dalam partai politik ditandai dengan sangat jarang remaja di Kelurahan Telaga Sari menjadi pengurus anggota partai politik ini dikarenakan belum begitu merespon ajakan dari kader partai untuk bergabung dalam struktur keanggotaan partai politik. Kurangnya minat remaja untuk bergabung struktur partai disebabkan oleh banyak faktor antara lain faktor kesibukan sehari-hari sehingga remaja sulit membagi waktu antara bekerja dengan mengurus partai. Selain faktor waktu, kurangnya masalah pendidikan politik dikalangan remaja, sehingga remaja enggan untuk bergabung dalam pengurusan partai politik. Oleh karenanya perlu pendidikan politik bagi remaja, pendidikan politik bagi remaja perlu dilakukan secara sabar, konsisten dan berkelanjutan, pendampingan para tokoh pakar politik sangat diperlukan untuk mendewasakan remaja menjadi terbiasa dalam berpolitik. Orang



tua yang memahami politik menjadi penting artinya bagi remaja sehingga remaja menjadi terbiasa dewasa dalam keikutsertaan remaja berpartai politik.

### ***Diskusi Politik***

Keikutsertaan remaja dalam diskusi politik sangat rendah dapat dilihat dari hasil diskusi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kelurahan Telaga Sari bahwa jumlah yang ikut dalam diskusi politik sebanyak 4 jiwa (0,28%), laki-laki 3 jiwa (0,21%), perempuan 1 jiwa (0,007%) sedang remaja yang tidak ikut dalam diskusi politik 1.406 jiwa (99,71%), laki-laki 833 jiwa (59,07%) dan Perempuan 573 jiwa (40,63%). Memberikan pengertian dari 1.410 jiwa remaja mereka yang ikut dalam diskusi politik hanya 0,28% dan yang tidak ikut diskusi politik 99,71%.

Pada penelitian ini remaja dalam berdiskusi politik melibatkan orang tua atau teman-teman, bila dengan orang tua kami membicarakan keunggulan dari tiap-tiap pasangan calonnya, bila dengan teman-teman sebaya mereka membicarakan siapa calon yang mereka dukung. Dari gambaran diatas terlihat bahwa memang terdapat diskusi politik diantara pemilih remaja di Kelurahan Telaga Sari. Diskusi tersebut dilakukan dengan keluarga, dan teman sebaya secara informal.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa remaja di Kelurahan Telaga Sari mendiskusikan atau membicarakan masalah politik tidak berbentuk formal, melainkan remaja membicarakan masalah politiknya bersama keluarga dan teman-teman sebayanya bersifat sebentar dan singkat.

Rafael Raga Maran (2007:148) partisipasi yang bersifat sebentar atau singkat adalah diskusi politik informal. Diskusi politik informal adalah diskusi politik yang dilakukan bersifat sebentar dan berlangsung singkat, terkait dengan hasil wawancara diatas diskusi politik yang dilakukan oleh remaja kelurahan Telaga Sari berlangsung sangat singkat, tidak terstruktur dan tidak terjadwal melainkan bersifat singkat insidental pada saat pertemuan tidak sengaja dengan keluarga, sahabat, teman sekerja atau yang lainnya remaja saling mengadu gagasannya terhadap calon-calon yang mereka jagokan. Tidak ada kesimpulan yang jelas pada diskusi remaja seperti ini masing-masing membawa pendapatnya dan diskusi berakhir dengan apa adanya tidak ada kesimpulan yang permanen pada diskusi politik tersebut.

Rush dan Althoff (2011 : 122) mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik, maka bentuk partisipasi politik remaja dalam diskusi informal umum dalam politik artinya sebuah diskusi umum dalam politik yang dilakukan secara tidak resmi. Demikian halnya diskusi-diskusi politik yang dilakukan oleh remaja kelurahan Telaga Sari adalah diskusi yang dilakukan secara tidak resmi tanpa melibatkan panelis, moderator, serta audien yang jelas, remaja bergabung berkumpul bersama-sama mendiskusikan calon pimpinan pemerintah daerah tanpa menggunakan aturan diskusi politik yang benar, mereka berdiskusi apa

adanya. Partisipasi politik ini dilakukan oleh individu-individu dalam keluarga, tempat kerja, sahabat-sahabat atau teman sepermainan.

Keikutsertaan remaja Kelurahan Kelaga Sari dalam diskusi politik adalah bentuk diskusi politik informal. Artinya Diskusi Politik Remaja tidak dilakukan dalam bentuk formal seperti pada forum-forum diskusi politik melainkan remaja membicarakan masalah politiknya bersama keluarga dan teman-teman sebayanya tempat kerja atau tempat lainya bersifat sebentar dan singkat. Remaja dalam diskusi Politik sangat minim informasi, referensi termudah adalah informasi dari ke dua orang tuanya bapak atau ibunya, diskusi politik di lakukan dalam internal keluarga, orang tua menjadi dominan dalam pengambilan keputusan. Remaja dalam diskusi politik biasanya mengambil tema sangat sederhana membicarakan keunggulan dari tiap-tiap pasangan calonnya.

### ***Kampanye***

Remaja Kelurahan Telaga Sari khususnya Kota Balikpapan mengikuti kampanye dianggapnya kegiatan yang tidak banyak manfaat, sehingga remaja tidak mau ikut-ikutan, berhura-hura, mendatangi tempat-tempat kampanye yang di gelar di kota Balikpapan. Kegiatan remaja kesehariannya telah banyak mengikat waktu remaja sehingga kampanye dianggapnya mengganggu kesibukan remaja, sehingga kurang perhatian dalam menyikapi kampanye. Ini merupakan gejala remaja yang hidup di perkotaan sebagai gaya hidup individualistik, tidak ada waktu untuk ikut datang ke tempat keramaian yang bagi remaja dianggap kurang menarik termasuk kegiatan kampanye. Pandangan remaja terhadap kampanye yang dianggap menghambur-hamburkan uang, juga merupakan koreksi terhadap pelaksanaan kampanye pada masa yang akan datang. Remaja masa sekarang yang lebih dekat dengan teknologi informasi. Media sosial merupakan wadah yang diakrabi anak-anak muda yang paham teknologi dan menjadi strategi yang tepat untuk menggerakkan para pemilih remaja berbondong-bondong datang ke bilik suara. Seharusnya kampanye bagi remaja bisa dihadirkan dalam teknologi komunikasi informasi contohnya teknologi android sehingga remaja lebih cepat mengakses proses kampanye dalam genggamannya.

Remaja kurang menyukai kampanye yang bersifat formal yang melibatkan dialog dua arah, pada pertemuan-pertemuan tertutup, pada pertemuan-pertemuan kampanye seperti ini remaja tidak banyak dan tidak suka hadir sedangkan pada kampanye-kampanye bersifat terbuka, remaja lebih suka hadir. kampanye seperti ini biasanya ditandai dengan keramaian kehadiran hiburan, konvoi, jalan santai dengan puncak doorprize yang menggembirakan bagi masyarakat serta remaja.

Remaja di Kelurahan Telaga Sari mengikuti kampanye yang sifatnya massa, berarti remaja kelurahan Telaga Sari ikut hadir dan ikut kampanye meski tidak ada remaja yang ikut serta dalam kampanye yang sifatnya tertutup atau dialog. Kehadiran dan ikut kampanye itu menjadi tolok ukur partisipasi remaja dalam politik. Namun ada juga remaja yang tidak mengikuti kampanye massa,

dengan alasan tidak ingin ribet, tidak memiliki waktu serta beranggapan kalau kampanye hanya sekedar menghambur-hamburkan uang. Pemikiran remaja seperti ini perlu dikaji lebih lanjut dasar pemikirannya dalam partisipasi politik. Tujuan dari kampanye itu sendiri adalah untuk memaparkan kepada para pemilih bagaimana Visi dan Misi atau program-program calon-calon Kepala Daerah yang nantinya akan terpilih.

Keikutsertaan remaja dalam kampanye, di Kelurahan Telaga Sari lebih memilih mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan secara massa. Mereka tidak hanya sekedar datang untuk mencari hiburan doorprize melainkan juga untuk mengetahui Visi dan Misi yang diusung oleh pasangan calon, tidak ada remaja yang ikut serta dalam kampanye yang sifatnya tertutup atau dialog. Namun ada juga remaja yang tidak mengikuti kampanye massa, dengan alasan tidak ingin ribet, tidak memiliki waktu serta beranggapan kalau kampanye hanya sekedar menghambur-hamburkan uang. Menyikapi hal ini koreksi terhadap pelaksanaan kampanye pada masa yang akan datang. Remaja masa sekarang yang lebih dekat dengan teknologi informasi. Media sosial merupakan wadah yang diakrabi anak-anak muda yang paham teknologi dan menjadi strategi jitu untuk penyelenggaraan kampanye bagi remaja yang tidak mengikuti kampanye massa.

### ***Pemberian Suara***

Jumlah remaja yang menggunakan hak suara di Kelurahan Telaga Sari lebih banyak laki-laki di bandingkan perempuan. Jumlah laki-laki sebanyak 418 jiwa (53,18%) dan perempuan 368 jiwa (46,81%) dengan jumlah remaja yang menggunakan hak suara pada Pilkada di Kelurahan Telaga Sari 786 jiwa (55,74%) dari 1.410 jiwa yang terdaftar di DPT.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kelurahan Telaga Sari di laksanakan pada 44 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 38 Rukun Tetangga (RT), remaja yang telah memiliki hak pilihnya mendatangi TPS yang telah ditetapkan.

Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Telaga Sari berjumlah 44 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan rata-rata setiap Rukun Tetangga (RT) satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan ada beberapa Rukun Tetangga (RT) dengan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah RT 01, RT 11, RT 26, RT tahun 34, RT 38. Remaja yang telah memiliki hak pilihnya mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat dari mereka untuk menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran remaja di Kelurahan Telaga Sari dalam memberikan suara cukup tinggi dapat dilihat dari hadirnya remaja dalam pemberian suara sebesar 55,74%, remaja tidak ikut ketinggalan dalam berpartisipasi secara langsung untuk memilih Kepala Daerah, namun dalam hal ini peran politik remaja masih ada yang dipengaruhi pilihannya oleh pihak luar.

Seseorang yang telah memenuhi ketentuan sebagai pemilih dan telah terdaftar sebagai pemilih serta dengan sesuai syarat pemilih maka ia berhak memilih pada Pemilu tahun 2015. Remaja menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat yang juga menjadi andil dari berjalannya pemilihan Kepala Daerah tahun 2015. Pemberian suara dalam Pilkada merupakan pengalaman pertama bagi remaja untuk memilih pemimpin. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa remaja di Kelurahan Telaga Sari melakukan hak pilihnya antara lain karena adanya kesadaran politik sebagai warga negara, keantusiasan mereka memilih Kepala Daerah karena ini adalah pengalaman pertama bagi mereka. Disamping itu adalah faktor kemudahan dalam melakukan aktifitas politik.

Rafael Raga Maran (2007:148) partisipasi dalam pemberian suara merupakan partisipasi yang tidak banyak menuntut upaya. Artinya adalah remaja yang telah memenuhi hak pilihnya menjaga kesehatannya memantapkan pilihannya meski tidak menuntut banyak upaya partisipasi politik ini sangat menentukan untuk penetapan pimpinan daerah sebagai pemenangnya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Rush dan Althoff.

Rush dan Althoff (2011:122) yang menyatakan bahwa bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemberian suara (*voting*), pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, dan banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam partisipasi politik ini. Penetapan hasil pemberian suara (*voting*) menjadi indikator akhir, perolehan suara terbanyak menjadi pemenang dalam kontestasi politik itu sendiri.

Hasil wawancara yang perlu di perhatikan adalah pemberian suara oleh remaja, karena dalam memilih masih sangat dominan dipengaruhi oleh faktor keluarga dan kerabat dekat. Pilihan politik mereka ternyata belum seratus persen mandiri dan berdasarkan hati nurani. Hal ini terjadi karena kurangnya pengalaman dalam bidang politik di kalangan remaja.

Keikutsertaan remaja dalam pemberian suara partisipasi remaja Kelurahan Telaga Sari sangat antusias dan cukup tinggi, remaja melakukan hak pilihnya antara lain karena adanya kesadaran politik sebagai warga Negara. Remaja telah menggunakan hak pilihnya dengan cara mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat hak memilih ini penting artinya bagi remaja menentukan pimpinan pada masa yang akan datang dan melakukan pencoblosan kartu suara pada bilik suara yang telah disediakan, namun dalam hal ini peran politik remaja masih ada yang dipengaruhi pilihannya oleh pihak luar, masih terpengaruh faktor keluarga dan kerabat dekat. Pilihan politik mereka ternyata belum seratus persen (100%) mandiri dan berdasarkan hati nurani. Hak memilih ini penting artinya bagi remaja menentukan pimpinan pada masa yang akan datang.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Keikutsertaan remaja di Kelurahan Telaga Sari dalam Partai Politik adalah menjadi keanggotaan pasif yaitu remaja tidak terlibat langsung dalam partai politik ditandai dengan sangat jarang remaja di Kelurahan Telaga Sari menjadi pengurus anggota partai politik.
2. Partisipasi remaja di Kelurahan Kelaga Sari dalam diskusi politik adalah bentuk diskusi politik informal, remaja membicarakan masalah politiknya bersama keluarga, teman-teman sebayanya, tempat kerja atau tempat lainnya bersifat sebentar dan singkat serta minim informasi politik.
3. Partisipasi remaja di Kelurahan Kelaga Sari dalam kampanye, remaja di Kelurahan Telaga Sari lebih memilih mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan secara massa. Remaja tidak hanya sekedar datang untuk mencari hiburan doorprize melainkan juga untuk mengetahui Visi dan Misi yang diusung oleh pasangan calon.
4. Partisipasi remaja di Kelurahan Kelaga Sari dalam pemberian suara, partisipasi remaja Kelurahan Telaga Sari sangat antusias dan cukup tinggi, remaja melakukan hak pilihnya antara lain karena adanya kesadaran politik sebagai warga Negara.

### ***Saran***

1. Agar remaja Kelurahan Telaga Sari aktif dalam suatu partai politik yaitu remaja terlibat langsung dalam partai politik maka diperlukan pendekatan, pembinaan, sosialisasi, serta pembelajaran dari partai-partai sehingga remaja dapat berperan aktif sebagai anggota partai politik.
2. Agar remaja Kelurahan Telaga Sari dalam diskusi politik dapat terlibat dalam bentuk diskusi politik formal, maka diperlukan pembinaan, arahan sosialisasi pembelajaran dan dorongan berbagai pihak seperti keluarga serta tokoh-tokoh masyarakat, sehingga remaja dapat berperan dalam diskusi politik formal.
3. Agar Keikutsertaan remaja dalam kampanye, di Kelurahan Telaga Sari lebih maksimal dalam mengikuti kampanye, maka diperlukannya pendekatan dari partai-partai pengusung kepada remaja agar remaja bisa tertarik dalam mengikuti kampanye.
4. Agar remaja dalam pemberian suara di Kelurahan Telaga lebih antusias dan tinggi, maka diperlukan pembinaan, arahan sosialisasi, pembelajaran dan dorongan dari berbagai pihak seperti sekolah-sekolah dan penyelenggara pemilu, sehingga remaja dapat memberikan suaranya secara maksimal dalam pelaksanaan pilkada.

### **Daftar Pustaka**

- Budiarjo, Mariam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Gatara, A.A. Sahid. 2007. *Sosilologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung : C.V Pustaka Setia.

- Maran, Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Monks, A.M.P. Knoers. 2002. *Psikologi perkembangan*. Jogjakarta : Gadjah Mada Univerity Press.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala daerah Langsung*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Satrier, Wahyu Ishardino. 2011. “Mendamba Pemilukada Damai Kabupaten Bekasi 2012 : Syarat Keberhasilan Pemilukada Langsung”. *Jurnal FISIP : Madani*.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widisarana Indonesia.
- Suryadi B. 2007. *Sosiologi politik : Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*. Jogjakarta : IRCiSOD.